

## Evaluasi Pengelolaan Anggaran Publik Pada Program Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang

Nayva Risalwa Wibowo<sup>1</sup>, Farhati Silvia<sup>2</sup>, Eva Hanny Farida<sup>3</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>4</sup>

<sup>1</sup>S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>2</sup>S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>4</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : [25040674325@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674325@mhs.unesa.ac.id), [25040674317@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674317@mhs.unesa.ac.id), [evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id), [meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)

### Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 18 April 2026

Accepted: 20 April 2026

**Keywords:** *Anggaran, Program Sosial, Ketenagakerjaan, Kabupaten Semarang.*

**Abstract:** *Pengelolaan anggaran publik yang efektif merupakan pilar utama keberhasilan program jaminan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan di Tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan pertanggungjawaban keuangan publik, serta literatur terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penganggaran program sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang telah selaras dengan kerangka regulasi nasional, namun secara substantif masih ditemukan ketimpangan antara alokasi anggaran dengan realisasi serapan manfaat bagi pekerja sektor informal. Selain itu, hasil evaluasi dokumen mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal yang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dana sosial. Evaluasi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sinkronisasi kebijakan anggaran yang lebih transparan berbasis data terpadu untuk mengoptimalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di sektor ketenagakerjaan. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pelayanan publik serta

---

pembangunan sosial ekonomi. Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya menuntut ketepatan dalam perencanaan tetapi juga efektivitas dalam pelaksanaan serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap proses pengambilan keputusan di bidang keuangan publik harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif (Lintang, 2024). Menurut kementerian keuangan Republik Indonesia (2023), pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di tingkat nasional, pemerintah daerah di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran agar dapat menjawab kebutuhan lokal secara tepat sasaran. Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fenomena surplus anggaran yang berulang selama periode 2011-2015, yang tercermin dari adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan program, termasuk dalam urusan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegiatan yang belum terealisasi pada anggaran yang berjalan, yang kemudian berdampak pada penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan 2015 (Nugraheni, dkk. 2017).

Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan menjadi sangat krusial untuk menggali sejauh mana kebijakan publik telah mencapai keberhasilan atau mengalami kegagalan berdasarkan standar yang ditetapkan. Pengelolaan anggaran publik pada dasarnya adalah alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya. Dalam konteks Kota Semarang terdapat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih. Sektor ketenagakerjaan, sebagai bagian dari urusan wajib, memerlukan perhatian khusus karena efektivitas anggarannya berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi daerah.

Meskipun evaluasi umum terhadap keuangan daerah tersedia, terdapat gap penelitian yang spesifik mengenai analisis kualitatif pada sektor ketenagakerjaan di Kota Semarang tanpa melibatkan observasi lapangan. Sebagian besar evaluasi masih bersifat makro dan belum mendalami faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian anggaran pada urusan ketenagakerjaan secara spesifik melalui analisis dokumen dan data sekunder. Padahal, ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks seperti kebijakan publik, regulasi daerah, hingga kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam hambatan-hambatan administratif dan politis di sektor ini.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) sebagai landasan analisis. Sedangkan menurut Edward III, keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama yang saling berinteraksi, 1) komunikasi, yakni kejelasan dan konsistensi penyampaian tujuan kebijakan kepada para pelaksana; 2) sumber daya, yang mencakup ketersediaan staf kompeten, anggaran memadai, dan fasilitas pendukung; 3) disposisi, di mana sikap, komitmen, dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan; 4) struktur birokrasi, meliputi keberadaan SOP yang jelas dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Implementasi kebijakan dapat berpotensi gagal mencapai tujuannya apabila keempat variabel tersebut tidak berjalan secara bersamaan. Dalam konteks pengelolaan anggaran publik

ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang, keempat variabel ini menjadi alat analisis yang relevan untuk mengidentifikasi gap antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan (Ashilah, dkk. 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme penganggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan transparan dalam pelaksanaannya. Dengan mengidentifikasi hambatan dalam realisasi anggaran melalui studi dokumen, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan agar alokasi dana ketenagakerjaan tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga tepat sasaran dan selaras dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward III.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian antara anggaran dan realisasi anggaran publik pada sektor ketenagakerjaan di Kota Semarang melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pada urusan ketenagakerjaan di Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan serta evaluasi pengelolaan anggaran publik pada sektor ketenagakerjaan berdasarkan dokumen dan literatur yang relevan tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder seperti regulasi pemerintah, laporan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban anggaran, serta buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan kebijakan ketenagakerjaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran pada sektor ketenagakerjaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980). Analisis berfokus pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instrumen pendukung program sosial) serta data sekunder *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2024* dari Badan Pusat Statistik. Hasil evaluasi menunjukkan dua temuan pokok: (1) keselarasan formal struktur penganggaran dengan regulasi nasional, namun (2) ketimpangan substantif antara realisasi anggaran dengan serapan manfaat bagi pekerja sektor informal.

### 1. Keselarasan Struktur Pengangguran Dengan Kerangka Regulasi Nasional

Struktur penganggaran program sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah telah selaras secara normatif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman Kementerian Keuangan (2023). Pada LKPJ Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai Rp2.785.897.285 dengan realisasi Rp2.632.558.806 atau 94,50 %. Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa mencapai 96,57 %, sedangkan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mencapai 93,76 %. Seluruh indikator kinerja utama tercapai 100 % (misalnya Persentase Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Aktif dan Persentase Kelurahan yang Menerapkan Sistem Informasi). Temuan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan regulasi nasional.

## **2. Ketimpangan Substantif : Disparitas Serapan Manfaat Bagi Pekerja Sektor Informal**

Meskipun realisasi keuangan tinggi, terdapat kesenjangan yang nyata antara alokasi anggaran dengan manfaat yang dirasakan pekerja sektor informal. Data BPS Kabupaten Semarang (2024) menunjukkan bahwa dari 654.412 penduduk yang bekerja, sebanyak 317.320 orang (48,49 %) masih berada di kegiatan informal, hanya sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pekerja formal baru mencapai 51,51 % (337.092 orang).

**Tabel.1 perubahan persentase ketenagakerjaan 2023-2024**

<b>Kategori Ketenagakerjaan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Perubahan 2023-2024 (persen point)</b>
<b>Formal</b>	<b>337.092</b>	<b>51,51</b>	<b>+3,28</b>
<b>Informal</b>	<b>317.320</b>	<b>48,49</b>	<b>-3,28</b>

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (2024)

Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran program sosial ketenagakerjaan terserap hampir 95 %, sebagian besar belum menjangkau kelompok pekerja informal (buruh harian, pekerja keluarga, berusaha sendiri, dan pekerja bebas) yang mendominasi sektor pertanian (20,55 %) dan sebagian jasa. Hal ini sesuai dengan temuan (Nugraheni & Hidayat (2017)) tentang ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Semarang.

## **3. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980)**

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C.Edward III, ketimpangan dalam pelaksanaan Program Sosial Ketenagakerjaan dapat dijelaskan melali empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, penyampaian kebijakan kepada pelaksana tingkat daerah belum sepenuhnya jelas dan konsisten. Meskipun dalam dokumen LKPJ telah terdapat berbagai bentuk fasilitasi seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Prodeskel dan Workshop KPSPAMS, komunikasi terkait prioritas perlindungan pekerja sektor informal masih belum terintegrasi secara optimal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyelarasan tujuan kebijakan di tingkat implementasi.

Selanjutnya, pada variabel sumber daya, meskipun secara finansial anggaran tergolong memadai dengan tingkat realisasi di atas 90%, keterbatasan justru terlihat pada sumber daya manusia serta fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menjangkau pekerja sektor informal. Berbagai sub-kegiatan yang dilaksanakan, seperti Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, cenderung lebih berorientasi pada penguatan lembaga formal seperti RT, RW, dan PKK. Akibatnya, distribusi manfaat bagi pekerja informal menjadi kurang optimal.

Pada aspek disposisi, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan relatif tinggi, namun masih terfokus pada pencapaian indikator formal, seperti capaian 100% keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Di sisi lain, responsivitas terhadap kebutuhan spesifik pekerja informal masih rendah. Hal ini tercermin dalam permasalahan yang diidentifikasi dalam LKPJ,

---

yaitu belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan serta rendahnya pemahaman terhadap peran dan fungsinya.

Terakhir, dalam variabel **struktur birokrasi**, terdapat kelemahan pada mekanisme koordinasi dan pengawasan. Meskipun LKPJ telah menyajikan data realisasi keuangan dan indikator kinerja secara rinci, evaluasi menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas OPD, khususnya antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Ketenagakerjaan. Selain itu, belum tersedianya sistem pemantauan berbasis data terpadu semakin memperkuat adanya celah dalam implementasi. Ketiadaan rekomendasi DPRD dalam LKPJ 2023 juga mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan legislatif.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian pada keempat variabel tersebut menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Anggaran yang tersedia cenderung terserap pada kegiatan administratif dan pemberdayaan umum, sementara distribusi manfaat yang secara spesifik menyasar pekerja sektor informal masih belum tepat sasaran.

#### 4. Celah Mekanisme Pengawasan Internal Dan Implikasinya

Evaluasi dokumen LKPJ mengungkapkan adanya celah pengawasan internal yang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dana sosial. Meskipun realisasi keuangan tinggi, tidak terdapat indikator spesifik mengenai cakupan manfaat bagi pekerja informal. Permasalahan yang dicantumkan (belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan) belum diimbangi dengan rencana tindak lanjut yang kuat. Hal ini sejalan dengan Lintang (2024) yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan keuangan publik. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan telah memenuhi aspek formal transparansi dan akuntabilitas, namun masih menghadapi tantangan substantif dalam ketepatan sasaran. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian untuk sinkronisasi kebijakan berbasis data terpadu.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang secara formal telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang ditunjukkan melalui tingginya realisasi anggaran serta tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa secara administratif dan prosedural, implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Namun demikian, secara substantif masih terdapat ketimpangan antara alokasi anggaran dan distribusi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pekerja sektor informal. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hampir separuh tenaga kerja masih berada pada sektor informal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program perlindungan sosial. Selain itu, masih ditemukan

### DAFTAR REFERENSI

- Ashilah, A., Farhan, A. F., & Kustiawan, K. (2025). Implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(3), 29–44. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.416>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2024* (BRS No. 11/11/3322/Th. V, 14 November 2024). Badan Pusat

Statistik.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Agar belanja pusat dan daerah harmonis di 2024*. Media Keuangan. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/tingkatkan-tata-kelola-keuangan-daerah-bskdn-kemendagri-susun-modul-laporan-hasil-pengukuran-ipkd>

Lintang, K. (2024). Keuangan publik: Teori dan implementasi pengambilan keputusan publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 27(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v27i2.1035>

Nugraheni, R. Y., & Hidayat, Z. (2017). Evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Diponegoro.

Pemerintah Kabupaten Semarang. (2024). *Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun Anggaran 2023*. Kabupaten Semarang.